



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

I. DATA PRIBADI

- Nama : IMELDA ESTER RIANA
- Jabatan : PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
- NHK : 676227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.630.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/160 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 59 m²/58 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/58 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 113 m²/110 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/33 m² di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 43.17 m²/43.17 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 818.200.000

- MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- MOTOR, YAMAHA X MAX BG6 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000



5. MOTOR, VESPA PIAGGIO GTS 150 3V IE A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
6. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E CTV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
7. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	54.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	326.715.367
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.829.415.367
III. HUTANG	Rp.	310.172.219
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.519.243.148

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.